

ANALISIS REALISME NEOKLASIK TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA – TIONGKOK

Rizky Ihsan¹
rizkyihsan.ri@gmail.com

Abstract

Foreign policy is a tool for countries to achieve certain outcomes, including how to deal with another country in the international arena. When viewing a rising power as a threat, they push for balancing strategy in order to keep a country in check. It is generally pursued by enhancing their own military capability, or by maintaining alliance with one another. This article aims to analyze Indonesia-China relations in Joko Widodo's administration, where Jakarta tends to push for underbalancing strategy, as the political elites have different perceptions with one another as well as China's ambivalence policy toward Indonesia. Based on neoclassical realism, underbalancing occurs when a country's political elite is fragmented. In this particular case, this led to ineffective foreign policy toward China.

Key words: *foreign policy, Indonesia, China, neoclassical realism, underbalancing*

Pendahuluan

Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan militer dan ekonomi baru sejalan dengan sikap asertifnya di kawasan Asia. Di wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS), Tiongkok melakukan pembangunan pulau buatan di kepulauan Woody, Spratly dan Paracel. Bahkan, pada pertengahan tahun 2016, Tiongkok mengirimkan *medium-range ballistic missile* HQ-9 ke kepulauan Woody, yang merupakan wilayah sengketa di LTS.² Militerisasi juga dilakukan Tiongkok dengan membangun sejumlah hanggar, landasan pesawat terbang dan jaringan komunikasi militer di wilayah ini.

Tiongkok melakukan proyeksi kekuatan militernya di Asia terhadap wilayah sengketa di LTS, yang merupakan wilayah sengketanya dengan lima negara Asia lainnya, yakni Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei dan Malaysia. Dari keseluruhan negara yang terlibat, Tiongkok merupakan *claimant state* dengan wilayah klaim terbesar, yakni melalui *nine dashes line* miliknya. Indonesia, meskipun bukan merupakan negara pengklaim di LTS, mulai mengalami perselisihan dengan Tiongkok terkait dengan kedaulatan di sekitar perairan Natuna, yang merupakan wilayah yang kaya akan kandungan sumber daya alam.

¹ Alumnus Magister Hubungan Internasional, Universitas Indonesia.

² *The Washington Post*, (17 Februari 2016), "These are the Surface-to-Air-Missiles China Apparently just Deployed into the South China Sea", <https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/02/17/these-are-the-advanced-surface-to-air-missiles-china-just-apparently-deployed-into-the-south-china-sea/>

Berdasarkan perspektif realisme, peningkatan kapabilitas militer dan ekonomi Tiongkok di awal abad ke-21 sebagai *rising power* cenderung dipandang sebagai potensi ancaman.³ Kebangkitan negara sebagai kekuatan baru dalam sistem internasional dapat mengubah keadaan *status-quo* yang mengubah tatanan global yang sebelumnya dikuasai oleh *established power*. Mearsheimer, misalnya, berpendapat bahwasanya *rising power* cenderung melakukan maksimalisasi *power* yang dimilikinya untuk menjadi kekuatan hegemoni di kawasan dan kemudian memicu koalisi negara-negara untuk mengimbangnya.⁴

Tulisan ini akan membahas mengenai hubungan Indonesia dengan Tiongkok, dengan menggunakan teori realisme neoklasik. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai persepsi para elit politik Indonesia terhadap Tiongkok, yang menjadi penentu kebijakan luar negeri. Berlawanan dengan prediksi realisme, Indonesia cenderung tidak melakukan strategi *balancing* terhadap Tiongkok karena beberapa faktor internal dan eksternal.

Kerangka Pemikiran

Perspektif realisme merupakan salah satu aliran pemikiran tradisional dalam melakukan analisa hubungan internasional. Realisme klasik memfokuskan kajiannya pada faktor internal yang menentukan perilaku negara. Hans Morgenthau, misalnya, berpendapat bahwasanya perilaku negara ditentukan oleh sifat dasar manusia sebagai *animus dominandi* yang haus akan kekuasaan.⁵ Sifat alamiah manusia tersebut yang pada akhirnya membuat konflik menjadi tidak terhindarkan dalam politik internasional.

Realisme memusatkan perhatiannya pada kepemilikan *power* suatu negara yang digunakan untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional. Bagi kelompok realis, *relative power* akan menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Thucydides, misalnya, beranggapan bahwa negara kuat melakukan apa yang mereka kehendaki, dan negara lemah menderita sebagaimana mestinya.⁶ Meskipun demikian, kelompok realis klasik kurang memberikan porsi terhadap lingkungan eksternal atau sistem internasional.

Di lain pihak, pemikiran neorealisme menitikberatkan kajiannya pada posisi negara dalam sistem internasional sebagai faktor yang paling menentukan perilaku negara.⁷ Menurut realisme struktural ini, tujuan utama negara adalah *survival* atau mempertahankan

³ Lihat John Mearsheimer, "China's Unpeaceful Rise", *Current History* (April 2006), hal. 160.

⁴ *Ibid*, hal 162.

⁵ Hans Morgenthau, (1946), "Scientific Man Versus Power Politics" Chicago: University of Chicago Press, hal. 3.

⁶ Thucydides, *Complete Writings: The Peloponnesian War*, diadaptasi oleh Suresht Bald dalam Karen A. Mingst dan Jack L. Snyder (Ed.), (2004), *Essential Readings in World Politics 2nd edition*, New York: W.W Norton Company, hal. 19.

⁷ Kenneth Waltz, (1979), *Theory of International Politics*, 1979, Reading: Addison-Wesley, hal. 102-103.

keberlangsungannya dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Tiap-tiap negara tidak dapat memastikan intensi negara lainnya dalam ketiadaan otoritas yang melampaui negara dalam lingkungan internasional. Oleh karenanya, negara akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kapabilitas militernya dalam melindungi dirinya masing-masing dari segala bentuk ancaman.

Adapun konsep perimbangan kekuatan (*balance of power*) merupakan kondisi *equilibrium* yang menandakan adanya stabilitas dalam sistem internasional. Apabila keadaan tersebut mengalami perubahan, maka kekuatan otonom yang berada di dalamnya cenderung mempertahankan atau membentuk kembali tatanan internasional yang baru. Bagi kelompok neorealis, perimbangan kekuatan merupakan *law of nature* dan negara-negara akan saling mengimbangi satu sama lain karena keadaan struktural mendorong mereka.⁸

Dalam kerangka neorealisme, terdapat dua langkah negara dalam menghadapi ancaman, yakni *balancing* dan *bandwagoning*. *Balancing* merupakan upaya negara untuk mengimbangi sumber ancaman dengan membentuk aliansi dengan negara-negara lainnya dalam menghadapi negara target, sedangkan *bandwagoning* dilakukan dengan melakukan aliansi dengan sumber ancaman tersebut.⁹ Adapun internal *balancing* dilakukan negara dengan melakukan peningkatan kapabilitas pertahanannya sendiri, sedangkan *external balancing* dilakukan dengan menjalin aliansi dengan negara lain. Meskipun demikian, kajian neorealisme ini bukan merupakan instrumen untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara secara khusus.¹⁰

Realisme neoklasik berupaya menggabungkan pemikiran keduanya, yakni dengan memperhitungkan unsur politik domestik dan juga lingkungan eksternal suatu negara. Dalam hal ini, Gideon Rose berargumen bahwasanya ambisi dan ruang lingkup kebijakan luar negeri ditentukan oleh posisi negara tersebut dalam sistem internasional serta kekuatan relatifnya. Bagaimanapun, implikasi dari kapabilitas *power* tersebut bersifat kompleks, dan hanya dapat dijelaskan melalui *intervening variable* pada level unit.¹¹ Pilihan kebijakan luar negeri akan ditentukan oleh para pengambil kebijakan dan elit politik. *Neoclassical realism* berupaya menjelaskan mengapa tiap-tiap negara mengambil strategi yang berbeda dalam arena internasional.

⁸ Christopher Layne, (1997), "From Preponderance to Offshore Balancing: America's Future Grand Strategy", *International Security*, Vol. 22, No. 1 (Summer 1997), hal. 117.

⁹ Stephen M. Walt, (1987), *The Origins of Alliances*, Ithaca: Cornell University Press, hal. 17.

¹⁰ Kenneth Waltz, *Op. Cit.*, hal. 121.

¹¹ Gideon Rose, (1998), "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy", *World Politics*, Vol. 51, No.1 (Oct 1998), hal. 146.

Kebijakan luar negeri suatu negara sangat dipengaruhi oleh persepsi pemimpin serta struktur negara tersebut dalam sistem internasional. Perspektif ini berupaya untuk menjelaskan varian kebijakan luar negeri dari suatu negara dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, hipotesis realis neoklasik dapat menjelaskan kemungkinan respon militer, ekonomi maupun diplomatik dari negara tertentu terhadap sistem, namun tidak mampu menjelaskan konsekuensi sistemik dari respon-respon tersebut.¹²

Realisme neoklasik menitikberatkan pada beberapa elemen yang menentukan kebijakan luar negeri,¹³ *pertama*, pandangan ini secara khusus membahas mengenai strategi negara-negara besar, namun dapat juga diterapkan pada negara kecil dan menengah, *kedua*, mengikutsertakan variabel eksternal dan internal negara dalam modelnya. Hal ini karena ancaman dapat berasal dari lingkungan eksternal maupun internal suatu negara. Selain itu, pihak eksekutif kebijakan luar negeri (*Foreign Policy Executive; FPE*) berada di tengah-tengah antara politik domestik dan internasional. *Ketiga*, pandangan ini menempatkan kepemilikan *power* sebagai faktor yang paling menentukan dalam politik. *Keempat*, tidak ada faktor penghubung sempurna yang menghubungkan kapabilitas material dan perilaku kebijakan luar negeri.

Sedangkan dalam pandangan realisme neoklasik, terdapat beberapa strategi negara dalam menghadapi ancaman.¹⁴ Menggunakan kerangka realisme neoklasik, tulisan ini berargumen bahwasanya Indonesia gagal melakukan *balancing* terhadap Tiongkok karena disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, mispersepsi dan ketiadaan *elite consensus* di kalangan eksekutif yang menjadi faktor penyebabnya. Sedangkan, dari lingkungan eksternal, sikap ambivalen Tiongkok terhadap Indonesia juga mempengaruhi perilaku *underbalancing* dari Indonesia.

¹² J. W. Taliaferro, S. E. Lobell, and N. M. Ripsman, (2009), *Neoclassical Realism, The State and Foreign Policy*, New York: Cambridge, hal. 21.

¹³ Stephen Lobell dalam J. W. Taliaferro, S. E. Lobell, and N. M. Ripsman, *Ibid.*, hal. 43.

¹⁴ Berdasarkan pemikiran realisme neoklasik, terdapat empat kategori perilaku negara dalam menghadapi ancaman, pertama adalah *appropriate balancing*, yakni terjadi apabila ancaman dari negara agresor bersifat mendesak dan direspon dengan melakukan peningkatan kapabilitas militernya. Kedua, *overbalancing* terjadi jika suatu negara melakukan upaya *balancing* secara berlebihan ketika negara target hanya bermaksud untuk meningkatkan keamanan dirinya. Ketiga, *non-balancing*, yakni perilaku tidak melakukan balancing terhadap ancaman, yang dapat berupa *bandwagoning*, *buck-passing*, *appeasement*, *engagement*, *distancing* atau *hiding*. Sedangkan *underbalancing* terjadi ketika negara melakukan mispersepsi terhadap *rising power* sebagai kekuatan yang tidak berbahaya, dan karenanya tidak membuat kebijakan yang melindungi dirinya. Lihat Randall L. Schweller, (2004), "Unanswered Threats: A Neoclassical Theory of Underbalancing", *International Security*, Vol 29 No. 2 (Fall 2004), hal. 167 – 168.

Pembahasan

Sesuai dengan pandangan realisme neoklasik, perilaku Indonesia dipengaruhi oleh faktor politik dalam negeri yang berperan dalam menentukan kebijakan nasional. Baik konsensus atau perbedaan persepsi di lingkungan elit politik merupakan salah satu penyebab utama dari perilaku dan keputusan negara. Dalam mengantisipasi ancaman, hal yang paling menentukan adalah *pertama*, pendapat elit pengambil keputusan mengenai keberadaan ancaman dari luar dan *kedua*, langkah yang diambil para pengambil kebijakan terkait guna melindungi kepentingan nasional. Persetujuan dari para pengambil kebijakan merupakan faktor krusial dari suatu negara dalam melakukan *balancing*.

Sepanjang tahun 2016, sempat terjadi beberapa kali perselisihan antara kapal *Coast Guard* Tiongkok dengan kapal laut milik otoritas Indonesia. Pada bulan Maret 2016, misalnya, kapal penjaga pantai Tiongkok berupaya mencegah penangkapan kapal Kway Fey 10078 yang hendak ditangkap oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di sekitar kepulauan Natuna. Menurut pihak KKP, kapal nelayan milik Tiongkok tersebut menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan melanggar kedaulatan Indonesia di Natuna.¹⁵ Insiden tersebut sempat menimbulkan perdebatan, terutama setelah pihak Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa nelayan tersebut menangkap ikan di “wilayah penangkapan tradisional” negaranya dan tidak melakukan pelanggaran.¹⁶

Insiden antara kapal Tiongkok dan Indonesia kembali terulang pada bulan Mei dan Juni 2016. Pemerintah Tiongkok menuduh militer Indonesia telah menyalahgunakan kekuatan militernya untuk menakut-nakuti nelayannya dan mengeluarkan protes keras.¹⁷ Berulangnya insiden ini mengundang reaksi yang cukup keras dari pemerintah Indonesia. Pada akhir Juni 2016, Presiden Jokowi menggelar pertemuan Kabinet di atas kapal perang KRI Imam Bonjol yang melintasi perairan Natuna, bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Menteri Luar Negeri, Sekretaris Kabinet dan Panglima TNI. Secara diplomatik, tindakan ini dapat diartikan sebagai sinyal keras bagi

¹⁵ *The Jakarta Post*, (22 Maret 2016), “RI-China Sea Spat Continues”, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/22/ri-china-sea-spat-continues.html>

¹⁶ *The New York Post*, (21 Maret 2016), China’s Coast Guard Rams Fishing Boat to Free It from Indonesian Authorities, https://www.nytimes.com/2016/03/22/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing-boat.html?_r=0

¹⁷ Hua Chunying, (19 Mei 2016), Remarks on Indonesian Navy Vessels Harassing and Shooting Chinese Fishing Boats and Fishermen, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1373402.shtml

Tiongkok. Namun demikian, pemerintah juga menegaskan bahwa tidak memiliki klaim tumpang tindih dengan negara manapun di Natuna.¹⁸

Perbedaan pendapat terjadi di kalangan pemerintah Indonesia terkait dengan insiden Natuna. Menteri Luar Negeri, misalnya, menyatakan bahwa kejadian penangkapan ikan oleh nelayan Tiongkok tidak terkait dengan isu sengketa LTS dan hanya sebatas persoalan *illegal fishing* semata.¹⁹ Pernyataan senada juga disampaikan oleh mantan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan bahwa Tiongkok tetap merupakan sahabat bagi Indonesia.²⁰ Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menegaskan perlunya untuk terus membina hubungan baik dengan Tiongkok.²¹

Namun, di lain pihak, Menteri KKP Susi Pudjiastuti justru merasa ada “sabotase” terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menjadi mediator dan menyelesaikan sengketa di LTS.²² Sejalan dengan pernyataan tersebut, Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga menganggap Tiongkok sebagai potensi ancaman bagi kedaulatan Indonesia, dan pecahnya konflik di Natuna terjadi akibat beroperasinya kapal *Coast Guard* yang mengawal aktivitas *illegal fishing* tersebut.²³ Pendapat yang saling bertentangan ini juga menandakan kurangnya koordinasi dan *elite consensus* dari pihak eksekutif sebagai penentu kebijakan.

Meskipun sempat mengirimkan nota protes secara diplomatik, Kementerian Luar Negeri Indonesia tetap berpendirian bahwasanya konfrontasi yang terjadi di Natuna merupakan permasalahan hukum, dan bukan merupakan masalah politik. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyanggah anggapan Tiongkok bahwa telah terjadi klaim tumpang tindih antara kedua negara di perairan tersebut.²⁴ Ambiguitas di kalangan pembuat kebijakan ini juga menghambat adanya formulasi kebijakan luar negeri yang proporsional.

¹⁸ *Reuters.com*, (22 Juni 2016), “Indonesia Says No Overlapping South China Sea with China”, <http://uk.reuters.com/article/uk-southchinasea-indonesia-idUKKCN0Z80NE>

¹⁹ *Kompas.com*, (22 Juni 2016), “Menlu: Pencurian Ikan di Natuna Masalah Penegakan Hukum, Bukan Politik”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/22/11344961/menlu.pencurian.ikan.di.natuna.masalah.penegakan.hukum.bukan.politik>

²⁰ *Antaraneews.com*, (22 Maret 2016), “Menkopolhukam Ingin Tingkatkan Kekuatan AL di Natuna”, <http://www.antaraneews.com/berita/551439/menkopolhukam-ingin-tingkatkan-kekuatan-tni-al-di-natuna>

²¹ *BBC.com*, (1 Juni 2016), “Seberapa Efektif Rencana Menambah Kekuatan Militer di Natuna?”, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160531_indonesia_ryamizard_natuna

²² *Reuters*, (21 Maret 2016), “Indonesia Says It Feels Peace Efforts on South China Sea ‘Sabotaged’”, <http://www.reuters.com/article/us-indonesia-southchinasea-idUSKCN0WN0B6>

²³ Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/11/2016), Panglima TNI menyebutkan bahwasanya perilaku Tiongkok mengancam Indonesia, dikutip dari Panglima TNI: Ancaman Tiongkok Terhadap NKRI Nyata, *Indonesiasatu.co*, 6 Februari 2017 <http://indonesiasatu.co/detail/panglima-tni--ancaman-tiongkok-terhadap-nkri-nyata>

²⁴ *Reuters*, (22 Juni 2016), “Indonesia Says Has No Overlapping South China Sea Claims with China”, <http://uk.reuters.com/article/uk-southchinasea-indonesia-idUKKCN0Z80NE>

Terkait dengan hal ini, Presiden juga sempat mendesak adanya satu suara di kalangan pejabat negara dalam menyikapi isu LTS.²⁵

Faktor domestik lainnya terkait dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang cenderung lebih berorientasi *inward looking* atau lebih memprioritaskan persoalan domestik ketimbang urusan luar negeri. Sebagai penentu kebijakan eksekutif, Presiden merupakan pihak utama dalam menentukan kebijakan luar negeri. Pada periode awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi bahkan memandang isu sengketa LTS sebagai permasalahan negara-negara tetangga, dan oleh karenanya, Indonesia tidak perlu terlalu ikut campur.²⁶

Sejalan dengan argumentasi tersebut, sistem pemerintahan juga turut berpengaruh pada orientasi kebijakan luar negeri. Negara demokrasi cenderung lebih lambat dalam melakukan *balancing* terhadap ancaman, karena beberapa alasan,²⁷ *pertama*, *non-balancing* merupakan respon *status-quo* negara terhadap ancaman, *kedua*, terlalu banyak pihak pengambil keputusan yang berperan sebagai *veto players* yang dapat membatalkan suatu kebijakan luar negeri. Dalam konteks Indonesia, kebijakan-kebijakan strategis terkait persoalan luar negeri juga ditangani oleh sekretariat Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), serta Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Banyaknya pihak yang terlibat dalam formulasi pengambilan kebijakan luar negeri cenderung memperlambat proses pembuatan keputusan.

Sedangkan dari faktor eksternal, perilaku Tiongkok terhadap Indonesia juga turut mempengaruhi perilaku *underbalancing*. Dari sisi politik, Tiongkok memiliki klaim tumpang tindih di kepulauan Natuna yang, menurut Pemerintah Indonesia, masih merupakan wilayah ZEE. Kapal *Coast Guard* Tiongkok bahkan diinstruksikan untuk menjaga keselamatan para nelayan yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Natuna. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pihak Beijing telah menyatakan bahwa terdapat *overlapping claims* antara

²⁵ *Antaraneews.com*, (13 Juni 2016), "Luhut Dipanggil Jokowi untuk Bahas Laut Cina Selatan", <http://www.antaraneews.com/berita/567093/luhut-dipanggil-jokowi-untuk-bahas-laut-china-selatan>

²⁶ *Beritasatu.com*, (22 Juni 2014), "Jokowi: Kalau Tidak Bisa Beri Solusi Buat Apa Ikut Campur Konflik Laut Cina Selatan", <http://www.beritasatu.com/nasional/191913-jokowi-kalau-tak-bisa-beri-solusi-buat-apa-ikut-campur-konflik-laut-china-selatan.html>

²⁷ Randall Schweller, *Op.Cit.*, hal. 172. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), yang saat itu masih menjabat sebagai *National Security Adviser*, Condoleeza Rice, memberikan testimoni terkait dengan respon lambat negara-negara demokrasi dalam mengatasi ancaman, dan cenderung menunggu untuk melakukan konfrontasi hingga ancaman menjadi terlalu berbahaya. Ia mencontohkan kejadian lambatnya AS terlibat dalam Perang Dunia pertama, bahkan setelah serangan tentara Jerman terhadap kapal laut AS dan penenggelaman kapal *Lusitania* pada tahun 1915. Pelanggaran perjanjian Versailles oleh Jerman pada pertengahan 1930-an juga terlambat direspon oleh negara-negara demokrasi hingga akhirnya baru ditanggapi pada tahun 1939. AS juga terlambat mengatasi ancaman dari kekaisaran Jepang hingga terjadinya serangan Pearl Harbor. Testimoni ini diberikan terhadap Independent National Commission terkait dengan serangan teroris terhadap AS

Tiongkok dan Indonesia. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan *traditional fishing grounds* negaranya serta memperingatkan Indonesia untuk tidak memperkeruh dan memperumit keadaan.²⁸

Namun demikian, hubungan Indonesia dengan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan perdagangan justru terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sepanjang tahun 2016, Tiongkok merupakan negara investor ketiga terbesar di Indonesia, dengan nilai investasi mencapai USD 1,5 Milyar dari periode bulan Januari hingga September 2016. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, terjadi laju peningkatan sebesar 291 persen.²⁹ Selain itu, ekspor komoditi non-migas Indonesia ke Tiongkok periode Januari – Maret 2016 mencapai USD 2,84 Milyar, sedangkan volume impor mencapai USD 7,13 Milyar.³⁰ Berdasarkan beberapa fakta tersebut, hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara terjalin dengan sangat baik.

Berdasarkan alasan internal dan eksternal di atas, perilaku *underbalancing* ditunjukkan Indonesia terhadap potensi ancaman dari Tiongkok. Bertentangan dengan kerangka berpikir realisme, Indonesia tidak melakukan *balancing* sebagaimana lazimnya ditunjukkan terhadap *rising power*. Secara eksternal, ambivalensi Tiongkok juga berperan mengakibatkan respon Indonesia yang menganggap Tiongkok sebagai kekuatan yang cenderung bersahabat.

Penutup

Berdasarkan kerangka neorealis klasik, respon *underbalancing* Indonesia terhadap Tiongkok disebabkan oleh kompleksitas politik domestik para pengambil kebijakan. Keadaan politik domestik dan ketiadaan konsensus menentukan kebijakan nasional terhadap Tiongkok. Isu sengketa LTS, misalnya, menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan elit politik Indonesia dalam menghadapi sikap asertif Tiongkok. Selain itu, dalam negara demokrasi, suatu negara cenderung bersikap lambat dalam merespon ancaman.

Secara internal, pengambil kebijakan pada level elit cenderung terfragmentasi sehingga belum mampu memformulasikan kebijakan dengan efektif. Berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwasanya belum ada kesepakatan di level pembuat

²⁸ Hua Chunying, (19 Juni 2016), Remarks on Indonesian Navy Vessels Harassing and Shooting Chinese Fishing Boats and Fishermen, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1373402.shtml

²⁹ *The Jakarta Post*, (24 November 2016), "China Strengthens Grip on Indonesia", <http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/24/china-strengthens-grip-on-indonesia.html>

³⁰ *Katadata.com*, (10 Mei 2016), "Darmin Asks China to Help Reduce Indonesia's Trade Deficit", <http://en.katadata.co.id/news/2016/05/10/darmin-asks-china-to-help-reduce-indonesias-trade-deficit>

kebijakan, terkait dengan bagaimana seharusnya Indonesia menghadapi Tiongkok. Pada satu kubu, terdapat elit politik yang menganggap Tiongkok sebagai “sahabat” yang dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Namun di lain pihak, ada pula elit yang justru beranggapan bahwa Tiongkok merupakan “ancaman” bagi kedaulatan Indonesia. Hal ini merefleksikan belum jelasnya orientasi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam menghadapi Tiongkok.

Secara geografis, LTS merupakan wilayah yang dapat menjadi *entry point* yang menimbulkan konflik antara Indonesia dengan Tiongkok. Konflik di Natuna juga merupakan dampak dari klaim *nine dashes line* Tiongkok terhadap LTS. Meskipun tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, Natuna berpotensi menjadi arena konflik antar kedua negara karena sifatnya yang terus berlarut-larut, bukan mustahil Indonesia akan turut terseret dalam sengketa teritorial di LTS di kemudian hari. Namun demikian, perselisihan tersebut tidak terlihat di bidang ekonomi, dengan tingginya volume perdagangan dan investasi Tiongkok di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga cenderung lebih memandang Tiongkok sebagai peluang ketimbang kekuatan baru yang dapat mengancam. Ambivalensi ini kemudian berdampak pada kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak mampu bersikap asertif terhadap potensi ancaman Tiongkok.

Daftar Pustaka

- Antaraneews.com*. 22 Maret 2016. “Menkopolhukam Ingin Tingkatkan Kekuatan AL di Natuna”. <http://www.antaraneews.com/berita/551439/menkopolhukam-ingin-tingkatkan-kekuatan-tni-al-di-natuna>.
- Antaraneews.com*. 13 Juni 2016. “Luhut Dipanggil Jokowi untuk Bahas Laut Cina Selatan”. <http://www.antaraneews.com/berita/567093/luhut-dipanggil-jokowi-untuk-bahas-laut-china-selatan>
- BBC.com*. 1 Juni 2016. “Seberapa Efektif Rencana Menambah Kekuatan Militer di Natuna?” http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160531_indonesia_ryamizard_natuna
- Beritasatu.com*. 22 Juni 2014. “Jokowi: Kalau Tidak Bisa Beri Solusi Buat Apa Ikut Campur Konflik Laut Cina Selatan”. <http://www.beritasatu.com/nasional/191913-jokowi-kalau-tak-bisa-beri-solusi-buat-apa-ikut-campur-konflik-laut-china-selatan.html>
- Chunying, Hua. 2016. Remarks on Indonesian Navy Vessels Harassing and Shooting Chinese Fishing Boats and Fishermen, (19 Juni 2016). http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1373402.shtml.
- Indonesiasatu.co*. 6 Februari 2017. Panglima TNI: Ancaman Tiongkok Terhadap NKRI Nyata. <http://indonesiasatu.co/detail/panglima-tni--ancaman-tiongkok-terhadap-nkri-nyata>.

Katadata.com. 10 Mei 2016. "Darmin Asks China to Help Reduce Indonesia's Trade Deficit". <http://en.katadata.co.id/news/2016/05/10/darmin-asks-china-to-help-reduce-indonesias-trade-deficit>

Kompas.com. 22 Juni 2016. "Menlu: Pencurian Ikan di Natuna Masalah Penegakan Hukum, Bukan Politik". <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/22/11344961/menlu.pencurian.ikan.di.natuna.masalah.penegakan.hukum.bukan.politik>.

Layne, Christopher. 1997. "From Preponderance to Offshore Balancing: America's Future Grand Strategy". *International Security*, Vol. 22, No. 1 (Summer 1997).

Mingst, Karen A. dan Jack L. Snyder (Ed.). 2004. *Essential Readings in World Politics 2nd edition*. New York: W.W Norton Company.

Mearsheimer, John. 2006. "China's Unpeaceful Rise". *Current History*, (April 2006).

Morgenthau, Hans. 1946. *Scientific Man versus Power Politics*. Chicago: University of Chicago Press.

Reuters. 21 Maret 2016. "Indonesia Says It Feels Peace Efforts on South China Sea 'Sabotaged'". <http://www.reuters.com/article/us-indonesia-southchinasea-idUSKCN0WN0B6>.

———. 22 Juni 2016. "Indonesia Says Has No Overlapping South China Sea Claims with China". <http://uk.reuters.com/article/uk-southchinasea-indonesia-idUKKCN0Z80NE>.

Rose, Gideon. 1998. "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy". *World Politics*, Vol. 51, No.1 (Oct 1998).

Schweller, Randall L. 2004. "Unanswered Threats: A Neoclassical Theory of Underbalancing". *International Security*, Vol 29 No. 2 (Fall 2004).

Taliaferro, J. W., S. E. Lobell, dan N. M. Ripsman. 2009. *Neoclassical Realism, The State and Foreign Policy*. New York: Cambridge.

The Jakarta Post. 22 Maret 2016. "RI-China Sea Spat Continues". <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/22/ri-china-sea-spat-continues.html>.

The Jakarta Post. 24 November 2016. "China Strengthens Grip on Indonesia". <http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/24/china-strengthens-grip-on-indonesia.html>

The New York Post. 21 Maret 2016. "China's Coast Guard Rams Fishing Boat to Free It From Indonesian Authorities". https://www.nytimes.com/2016/03/22/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing-boat.html?_r=0.

The Washington Post. 17 Februari 2016. "These are the Surface-to-Air-Missiles China Apparently just Deployed into the South China Sea". <https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/02/17/these-are-the-advanced-surface-to-air-missiles-china-just-apparently-deployed-into-the-south-china-sea/>.

Walt, Stephen M. 1987. *The Origins of Alliances*. Ithaca: Cornell University Press.

Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics*. Reading: Addison-Wesley.